

ABSTRAK

Jawa Tengah adalah provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Dari 2011-2024 Jawa Tengah konsisten menempati posisi kedua dengan tingkat kemiskinan tertinggi se-Pulau Jawa. Kemiskinan berkaitan dengan inflasi, tingginya tingkat inflasi terutama di enam kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat mengurangi daya beli masyarakat dan meningkatkan kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada enam kabupaten/kota terhitung inflasi di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari belanja bantuan sosial, pajak daerah, inflasi, Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap kemiskinan di enam kabupaten/kota terhitung inflasi di Jawa Tengah dan apakah terjadi perbedaan kondisi kemiskinan pada tahun yang tidak terdampak pandemi Covid-19 dengan tahun yang terdampak pandemi Covid-19 di enam kabupaten/kota terhitung inflasi di Jawa Tengah.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan menguji data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Pengambilan data dari tahun 2011-2024 dari 6 Kabupaten/Kota terhitung inflasi di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang, dan Kota Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dan model estimasi yang terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil analisis menghasilkan temuan (1) belanja bantuan sosial dan pajak daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, (2) inflasi, UMK tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dan (3) tidak terjadi perbedaan kondisi kemiskinan pada tahun yang tidak terdampak pandemi Covid-19 dengan tahun yang terdampak pandemi Covid-19 di enam kabupaten/kota terhitung inflasi di Jawa Tengah.

Implikasi dari penelitian yaitu dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pemerintah diharapkan dapat menyalurkan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan bervariasi sehingga dapat menjangkau kebutuhan masyarakat miskin dan disabilitas. Pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan pajak daerah secara efisien untuk membiayai program pembangunan. Bagi masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan patuh membayar pajak sehingga dapat tercipta pembangunan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Belanja Bantuan Sosial, Pajak Daerah, Inflasi, Upah Minimum Kabupaten, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

Central Java is a province with a high poverty rate. From 2011-2024, Central Java consistently ranked second with the highest poverty rate in Java. Poverty related to inflation, high inflation rates especially in six regencies/cities in Central Java can reduce people's purchasing power and increase poverty. Therefore, this study focuses on six regencies/cities calculating inflation in Central Java. This study aims to assist in analyzing the effect of social spending, local taxes, inflation, District Minimum Wage on poverty in six regencies/cities including inflation in Central Java and whether there is a difference in poverty conditions in years not affected by the Covid-19 pandemic and years affected by the Covid-19 pandemic in six regencies/cities including inflation in Central Java.

This type of research is a quantitative approach by testing secondary data sourced from the Central Statistics Agency and the Directorate General of Fiscal Balance. Data collection from 2011-2024 from 6 regencies/cities calculated inflation in Central Java, namely Cilacap Regency, Banyumas Regency, Kudus Regency, Surakarta City, Semarang City, and Tegal City. The research method used is panel data regression and the best estimation model is the Fixed Effect Model (FEM). The results of the analysis produced findings (1) social assistance spending and regional taxes have a negative and significant effect on poverty, (2) inflation, district minimum wage do not have a significant effect on poverty, and (3) there is no difference in poverty conditions in years not affected by the Covid-19 pandemic and years affected by the Covid-19 pandemic in six regencies/cities calculated inflation in Central Java.

The implications of the study are that in an effort to eradicate poverty, the government is expected to be able to distribute social assistance that is more targeted and varied so that it can reach the needs of the poor and disabled. Local governments are expected to allocate local taxes efficiently to finance development programs. The community is expected to be able to contribute to increasing tax revenue by obediently paying taxes so that development can be created.

Keywords: Poverty, Social Assistance Spending, Regional Taxes, Inflation, District Minimum Wage, Covid-19 Pandemic